

EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

**Oleh:
TANTAN SALAMATAN ZEN
NPM: 198010029**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi kebijakan SAKIP di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan mengukur evaluasinya menggunakan kriteria evaluasi seperti efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi data, wawancara mendalam, dan kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan kualitatif deskriptif yaitu mengumpulkan, mengklasifikasikan, menginterpretasikan dan menganalisis data kemudian membuat kesimpulan dan saran-saran. (Lia Muliawaty, 2021)

Penelitian ini menjelaskan bahwa dari hasil evaluasi kebijakan SAKIP menunjukkan bahwa evaluasi SAKIP sudah dijalankan dengan cukup baik, namun perlu ada penerapan sistem pengendalian internal pemerintah agar komitmen peningkatan kinerja dapat dilakukan sesuai target yang akan dicapai.

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

ABSTRACT

This study aims to determine the evaluation of SAKIP policies evaluation within the Secretariat General of the Ministry of Public Works and Public Housing by measuring the evaluation using evaluation criteria such as effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness and accuracy.

Data collection techniques used are data observation techniques, in-depth interviews, and literature. This study uses qualitative method that is collecting, classifying, interpreting and analyzing data and make conclusions and suggestions.

This study explains that the result of evaluation of SAKIP policies indicate that the evaluation of SAKIP has been carried out quite well, but there needs to be an implementation of government's internal control system so that the commitment to improving performance can be carried out according to the targets to be achieve.

Keywords: Evaluation, Policy, Performance Accountability System for Government Agencies.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Allison, M., Kaye, J. 2013. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bryson, John, M. 1988. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N., 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Gibson, Ivancevich, Donnelly. 1997. *Organisasi*. Jakarta : Binarupa Aksara.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Lia Muliawaty. (2021). The Influence Of Democratic Leadership Style And Transformational Leadership On The Performance Of Youth And Sports Offices In Bandung City. *Nat. Volatiles & Essent. Oils*, 14389-14403.
- Fahmi, Irham. 2010. *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*. Bandung : Alfabeta.
- Puwanto, Agus, N. & Sulistyastuti, Ratih, D. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
- Rivai, Veithzal, & Mulyadi, Deddy. 2009. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Satibi, Iwan. 2012. *Manajemen Publik Dalam Perspektif Teoritik dan Empirik*. Bandung : Unpas Press.
- Satibi, Iwan. 2011. *Teknik Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Bandung : Ceplas.
- Sedarmayanti, Hj. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung : Refika Aditama.
- Surjadi, H. 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Malang : Refika Aditama.
- Susanto, Azhar. 2000. *Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya*. Bandung : Lingga Jaya.

Dokumen :

Sofyani, Hafiez. 2013. Jurnal : Hubungan Faktor Internal Institusi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi dan keuangan Indonesia.

Akbar, Muhammad Firyal. 2016. Jurnal : Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah. Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik.

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16).

Peraturan Menteri PUPR No. 13.1/PRT/M/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 – 2019.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.